

KONSEP MODERASI BERAGAMA DAN KERUKUNAN ANTARUMAT BERAGAMA SESUAI AJARAN ISLAM

Muhammad Bintang Al Giffary, Muhammad Rayhan Maulana, Muhammad Aries
Rahman, Farras Daffa Fadhillah, Nadi
Universitas Lambung Mangkurat
nadi.ulm@gmail.com,
muhmmdbintang70@gmail.com,
jakaramadhan0211@gmail.com,
rayyyoou12@gmail.com,
m.aries.rahman.095@gmail.com

Abstrak

Bangsa Indonesia adalah masyarakat multikultural dengan pluralisme. Keberagaman meliputi perbedaan budaya, agama, ras, bahasa, suku, tradisi, dll. Dalam masyarakat multikultural seperti itu sering timbul ketegangan dan konflik antar kelompok budaya yang mempengaruhi keharmonisan hidup. Presentasi ini bertujuan untuk merefleksikan keragaman budaya masyarakat Indonesia, moderasi beragama dan peran ustadz dalam mewujudkan perdamaian di kalangan masyarakat Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kehidupan multikultural memerlukan pemahaman dan kesadaran multikultural yang menghargai perbedaan, kemajemukan dan mau berinteraksi secara adil dengan siapapun. Diperlukan sikap keberagaman yang moderat seperti pengakuan terhadap keberadaan partai politik lain, sikap toleran, menghargai perbedaan pendapat dan pemaksaan kehendak tanpa kekerasan. Peran pemerintah, tokoh masyarakat dan ustadz diperlukan untuk komunikasi dan pengembangan moderasi beragama di masyarakat untuk kerukunan dan perdamaian. Kata kunci: multikulturalisme, moderasi beragama, penyuluhan agama.

1. Pendahuluan

Masyarakat Indonesia yang hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia itu beraneka ragam, antara lain suku, bahasa, agama, budaya, dan status sosial yang berbeda. Kebhinekaan dapat menjadi 'kekuatan pemersatu' yang mengikat masyarakat, tetapi juga dapat menimbulkan konflik antar budaya, " ras, suku, agama dan nilai-nilai kehidupan antar. Keanekaragaman budaya (multikultural) adalah fenomena alam yang dihasilkan dari pertemuan budaya yang berbeda, interaksi individu dan kelompok yang berbeda, membawa perilaku budaya dengan cara hidup yang berbeda dan spesifik, mis. keragaman budaya, latar belakang keluarga, agama dan suku, saling berinteraksi dalam masyarakat Indonesia. Dalam komunikasi horizontal antar masyarakat, Mulyana mengatakan, bentrokan antarsuku masih terjadi di berbagai tempat, mulai dari stereotipe dan prasangka sederhana antarsuku, diskriminasi hingga diskriminasi dan berakhir dengan konflik terbuka dan pembantaian antar suku yang merenggut nyawa manusia (Mulyana, 2008). Persaingan kesukuan tidak hanya terjadi di antara masyarakat tetapi juga di antara elit politik bahkan akademisi untuk memperebutkan posisi di berbagai instansi. Dalam masyarakat multikultural, komunikasi antar manusia cukup intens, sehingga keterampilan sosial warga dalam komunikasi interpersonal harus menjadi milik setiap anggota masyarakat. Menurut Curtis, keterampilan tersebut mencakup tiga domain, yaitu: rasa memiliki (cooperation), kerjasama dan penyelesaian konflik (cooperation and conflict resolution), kebaikan hati, kepedulian, dan cinta/penekanan (kebaikan, perhatian, dan cinta). Keberagaman suku, ras, agama, perbedaan bahasa dan nilai-nilai kehidupan di Indonesia seringkali menimbulkan berbagai konflik. Konflik-konflik dalam masyarakat yang timbul dari kekerasan antarkelompok yang meledak secara acak di berbagai wilayah Indonesia menunjukkan betapa rentannya rasa persatuan yang dibangun dalam negara-bangsa Indonesia, betapa tebalnya prasangka antarkelompok, dan betapa rendahnya saling pengertian antarkelompok. Konflik kekerasan di Indonesia seringkali menimbulkan bencana kemanusiaan yang berkembang dan meluas baik jenis maupun pelakunya. Oleh karena itu, proses penyelesaian konflik memakan waktu lama dan menimbulkan kerugian sosial, ekonomi, dan politik yang besar. Berdasarkan permasalahan yang silih berganti ini, Indonesia dapat berada dalam situasi krisis yang kompleks. Konflik dan kekerasan menyebar ke berbagai kalangan sosial. Pemicu kekerasan yang terjadi selama ini sering disalahartikan sebagai penyebab konflik. Konflik adalah penyebab terjadinya kekerasan, karena dibalik setiap bentuk kekerasan terdapat konflik yang tidak terselesaikan. Konflik tersebut mencapai tingkat kekerasan, dapat dikatakan konflik tersebut salah penanganan atau konflik diabaikan (Sutanto, 2005). Budaya kekerasan terkonsentrasi

sepanjang konflik itu destruktif atau destruktif. Konflik dipandang sebagai pertarungan antara yang baik dan yang jahat, hitam dan putih, menang dan kalah, menang dan kalah. Konflik dapat dilihat sebagai penyebab kekerasan yang perlu jika keberadaannya dipersepsikan secara negatif dan diselesaikan secara kompetitif, sehingga perlu upaya yang lebih serius dalam menangani konflik untuk menciptakan kedamaian dalam masyarakat. Dalam konteks sosial, sebagian pengelolaan perilaku konflik terjadi secara ketat, sedangkan sebagian lagi mengembangkan pendekatan pengasuhan. Sebagai contoh, dalam dunia pendidikan biasanya digunakan tiga pendekatan pendidikan untuk menyelesaikan konflik siswa, yaitu: [1] pendidikan perdamaian yang diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah, [2] latihan penyelesaian konflik secara konstruktif serta mediasi dan negosiasi sejawat. (Gerstein dan Moeschberger, 2003). Model resolusi konflik efektif antara lain dapat meningkatkan pengetahuan siswa tentang resolusi konflik konstruktif, lebih prososial, dan menghindari menjadi korban kekerasan (Laursen, Finkelstein, Betts, 2001). Mulai dari pegawai negeri hingga ustadz, fenomena keragaman budaya membutuhkan penyuluhan untuk memahami pengetahuan dan kesadaran multikultural agar mereka memiliki kompetensi untuk menghadapi perbedaan, sekecil apapun, dalam kelompok sasaran. Penyuluh harus meningkatkan pemahamannya, mandiri dalam pengetahuan tentang keragaman budaya, memahami adanya bentuk-bentuk diskriminasi, stereotipe dan rasisme yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat multikultural, penyuluh diharapkan menjadi inisiator perubahan dan ahli dalam mengatasi konflik dan bernegosiasi dengan masyarakat lokal untuk meningkatkan keharmonisan kelompok sasaran mereka. Seiring meningkatnya kebutuhan berbagai kelompok masyarakat akan pelayanan publik, penyuluh dihadapkan pada jangkauan pelayanan yang lebih luas lagi, sehingga mereka harus memahami multikulturalisme agar lebih efektif dalam pelayanan publik.

2. Kerangka Teori Pembelajaran Kontekstual

Indonesia dengan keragaman budaya, agama, suku dan bahasa menunjukkan bahwa ia adalah bangsa dengan masyarakat multikultural. Kebhinekaan itu sendiri merupakan berkah tersendiri, jika dikelola dengan baik menjadi keunikan dan kekuatan, namun pluralitas tersebut dapat menjadi tantangan, jika tidak disikapi secara arif dan bijaksana

dapat menjadi ancaman perpecahan dan konflik yang dapat mengoyak Jamsostek. Keanekaragaman budaya merupakan fenomena alam yang dihasilkan dari pertemuan berbagai perbedaan budaya

di mana setiap individu dan kelompok etnis bertemu, membawa serta perilaku budaya mereka sendiri, cara hidup yang khas. Konsep multikultural berbeda dengan konsep antarbudaya itu sendiri

Pengalaman budaya bangsa Amerika yang beragam karena kehadiran dan akumulasi budaya yang berbeda di negara tersebut. Dalam konsep multikultural, perbedaan individu mencakup makna yang luas, sedangkan dalam konsep transkultural fokusnya adalah pada perbedaan etnis. Secara linguistik, multikulturalisme dapat dipahami dengan memahami banyak budaya. Kebudayaan dalam artian merupakan ideologi dan sekaligus alat kemanusiaan tertinggi. Oleh karena itu penting untuk melihat budaya secara fungsional dan fungsional dalam pranata sosial. Tentang multikulturalisme deskriptif dan multikulturalisme normatif. Multikulturalisme deskriptif merupakan realitas sosial yang mencerminkan pluralitas. Multikulturalisme normatif, sebaliknya, mengacu pada landasan moral, yaitu adanya ikatan moral warga negara dalam kerangka negara/bangsa untuk berbuat sesuatu.

sesuatu yang menjadi kesepakatan bersama (Nugraha, 2008) dan nampaknya multikulturalisme normatif saat ini sedang berkembang di Indonesia. Muzhar Darlis, 2017 melihat multikulturalisme sebagai gagasan, cara pandang, kebijakan, sikap dan tindakan suatu komunitas. negara yang majemuk baik suku, budaya, agama dan lain sebagainya, tetapi berusaha mengembangkan jiwa kebangsaan yang dan bangga mempertahankan pluralitas ini. Konsep multikulturalisme tidak asing bagi dunia Islam, setidaknya pengalaman sejarah menegaskan bahwa Islam menghargai keberagaman,

seperti yang dilakukan oleh Nabi di pemerintahan Madinah. Multikulturalisme dikaitkan dengan ajaran Islam tentang toleransi, perdamaian dan keadilan, antara lain. a] Toleransi, sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat Al Hujuraat: 13, yang menegaskan bahwa Tuhan menciptakan manusia yang berbeda suku agar manusia saling mengenal. Perbedaan pendapat tidak boleh menjadi arena konflik, sehingga harus dihormati. Mengenal satu sama lain membuka jalan menuju kehidupan multikultural. b] kedamaian. Islam berasal dari akar kata "al-salam" yang artinya damai. Islam menyeru manusia untuk membangun dan menyebarkan perdamaian di muka bumi. QS al-Baqarah [2]: 208, "Udkhulu fi al-silmi kaffah" – yang

sering diterjemahkan "masuk kaffah Islam" – untuk menggunakan konsep multikulturalisme, ada yang mengarahkan kembali pemahaman yang mendekati konsep multikulturalisme, yaitu menyatakan kesiapannya untuk memasuki kaffah (utuh) perdamaian. Makna ini berbeda dengan makna harafiah yang menekankan perbedaan di satu sisi dan mengingkari keberadaan entitas esensial lainnya. c] Itu benar. Multikulturalisme menekankan keadilan dalam memandang dan bertindak terhadap orang atau kelompok lain. Al-Quran (Sura al-Maidah [5]: 8) "Dan janganlah kamu terkadang kebencianmu terhadap orang mendorongmu untuk bertindak tidak adil." Ayat ini memberitahu kita untuk bersikap adil bahkan kepada orang atau kelompok yang memusuhi kita. Bersikap adil berarti kita harus tetap bersikap adil

"objektif" bagi mereka. Ketika prinsip ini menjadi ruh kehidupan kita, maka kehidupan multikultural dapat terwujud. Negara Republik Federal

Indonesia adalah negara majemuk dan memiliki dua bentuk penting yang membentuk sifat multikulturalnya, yaitu demokrasi dan kearifan lokal sebagai nilai-nilai yang diyakini dan diyakini untuk menjaga kerukunan umat beragama. Dalam keragaman suku bangsa Indonesia, sebagian besar masyarakat Indonesia secara historis dan sosiologis mendukung Islam, namun jika dilihat pada tingkat provinsi atau daerah, seperti tingkat kabupaten/kota, ada yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khonghucu. yang menjadi mayoritas di lingkungan ini. Fakta dan informasi tentang keragaman agama di Indonesia menunjukkan adanya keragaman

Agama ini merupakan mozaik yang memperkaya khasanah kehidupan beragama Indonesia, namun di sisi lain keberagaman agama juga mengandung potensi.

mengancam keutuhan NKRI. Di sini diperlukan partisipasi seluruh warga negara untuk mencapai perdamaian. Kesadaran akan multikulturalisme memang tidak mudah, bahkan meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa keberagaman adalah keniscayaan sejarah. Menanamkan sikap adil dalam memperlakukan kebhinnekaan lebih sulit, karena sikap terhadap kebhinnekaan seringkali berhimpitan dengan kepentingan sosial, ekonomi, dan politik yang berbeda. Indonesia sebagai negara multikultural dengan penduduk muslim terbesar di dunia dan keragaman suku, budaya, bahasa dan agama juga menjadi masalah untuk mencapai keharmonisan dan keharmonisan.

Kenyamanan beragama, oleh karena itu, selain bekerja sama dengan para ahli yang tertarik dengan isu-isu multikultural, para ustadz juga harus berpikir untuk menginformasikan berbagai lembaga, lembaga, dan organisasi masyarakat tentang multikulturalisme guna membentuk kesadaran multikultural bersama. 3. Metode penelitian

Jenis penelitian ini adalah kajian literatur. Rencana penelitian adalah kajian literatur. Tinjauan literatur, atau tinjauan literatur (literature review, literature survey) adalah makalah penelitian di mana informasi, ide atau temuan yang terkandung dalam literatur akademik diperiksa atau dievaluasi secara kritis, dan kontribusi teoretis dan metodologis untuk topik tertentu dirumuskan. Data yang digunakan adalah data sekunder. Bahan pustaka digunakan sebagai bahan dalam penelitian kepustakaan dengan cara membaca buku, hasil penelitian, tulisan serta peraturan perundang-undangan yang terkait. Data sekunder adalah informasi penelitian yang diperoleh penulis secara tidak langsung melalui sarana yang diperantarai, diperoleh dan disimpan oleh pihak lain dan dalam materi lain. Analisis data dilakukan dengan membaca jurnal ilmiah yang memenuhi kriteria inklusi, setelah itu dikumpulkan dan dibuat ringkasan jurnal yang mencantumkan nama penelitian, tahun terbit jurnal, nama penelitian. . , prosedur dan ringkasan hasil atau outcome. Ringkasan jurnal ilmiah ditabulasikan sesuai dengan format tersebut di atas. Baca dan perhatikan penjelasan analisis abstrak dan teks lengkap jurnal.

Abstrak jurnal kemudian mencoba menganalisis isi dari tujuan penelitian dan hasil penelitian/penemuan. Isi jurnal dianalisis, kemudian isi jurnal peer-review dikodekan berdasarkan garis besar atau sifat penelitian, yang dilakukan dengan menyusunnya menjadi kalimat, kemudian mencari persamaan dan perbandingan dalam kasus suatu kasus. koleksi. . dalam setiap penelitian dan kemudian mendiskusikannya untuk menarik kesimpulan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatif untuk mengetahui hasil pengumpulan, pengklasifikasian, kemudian penarikan kesimpulan tentang teori dan tema yang ada. Kemudian dideskripsikan, yaitu diterangkan, dideskripsikan dan dideskripsikan sesuai dengan permasalahan yang berkaitan erat dengan penelitian ini.

4. Hasil Dan Pembahasan

Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia cukup tinggi. Angka pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) semakin meningkat. Beberapa kali terjadi wabah di berbagai tempat seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan bahkan Daerah Istimewa Yogyakarta. Tumbuhnya intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama

Tentu tidak, memang banyak kejadian di Kabupaten Sleman Yogyakarta dalam beberapa tahun terakhir ini,

Bantul dan Yogyakarta. Kasus hampir selalu terjadi setiap tahun, sehingga dapat dimaklumi jika Setara Institute pada tahun 2019 menyoroti Yogyakarta sebagai salah satu daerah intoleransi dengan jumlah pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) tertinggi. Fakta ini tentu saja cukup mengejutkan, karena menunjukkan bahwa Yogyakarta sangat kekurangan stamina dan menyebabkan cedera.

Palem sejarah Yogyakarta sendiri, dikenal sebagai kota toleran dan “rumah banyak nilai” yang terbuka dengan segala perbedaan yang dikandungnya. Peristiwa intoleransi yang dilakukan sendiri antara lain penolakan sedekah di Pantai Baru Bantul, pemotongan nisan salib di Makam Jambon Purbayan Kota Gede Yogyakarta, penolakan warga non muslim di Dusun Karet Bantul, penyerangan terhadap St. Gereja Lidwina di Jambon, Sleman, pelarangan ibadah di Isa Al Masih - Gereja di Ngentak, Pembubaran Pesantren di Margoluwih, Sleman, Al Fattah, tempat tinggal komunitas Waria di Jagalan, Bantul dan lain-lain. Kabupaten Kulon Progo (bagian dari Provinsi DIY) terlihat relatif terjangkau, tenang dan damai dibandingkan kabupaten/kota DIY lainnya yang sarat dengan intoleransi dan pelanggaran.

Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB). Dengan kata lain, Kulon Progo memiliki kasus intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama dan

Kepercayaan diri (KBB) yang tidak terlalu tajam. Meskipun Kulon Progo secara umum dapat dinilai relatif kondusif dan tenang dalam hal intoleransi dan pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan (FRB) dibandingkan kabupaten/kota DIY lainnya, bukan berarti Kulon

Progo sama sekali tidak memiliki potensi konflik intoleransi. Saat ini, masyarakat jarang mendengar atau melihat peristiwa pelanggaran

Peristiwa Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) di Kulon Progo menimbulkan kegemparan publik karena intensitas pemberitaan media, karena potensi konflik dapat dimitigasi dan diselesaikan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan akar rumput hingga ke tingkat daerah, sehingga

hingga menyebar kemana-mana. Peran pemerintah dan masyarakat dalam upaya mewujudkan kehidupan yang harmonis antar umat beragama selalu diwujudkan melalui berbagai kegiatan sosialisasi, workshop, dialog dan kepemimpinan, koordinasi Forkopimda dan Forkopimkap, dll.

Moderasi Islam mengutamakan persaudaraan berdasarkan prinsip kemanusiaan, bukan hanya prinsip agama atau kebangsaan. memahami

karena menemukan momentumnya di dunia Muslim pada umumnya

Saat ini krisis kemanusiaan sedang melanda, dan Indonesia khususnya masih menghadapi beberapa masalah kemanusiaan yang bersumber dari sikap beragama yang kurang moderat. Akibatnya, perkembangan hukum Islam menjadi dinamis dan mutakhir (Fahrudin, 2019). Pendekatan budaya juga bisa diterapkan. Kearifan lokal berasal dari dua kata yaitu Arif artinya cerdas, arif dan bijaksana (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Dengan awalan "ke" dan akhiran

“an” berarti hikmah atau hikmah yang tumbuh dan berbeda satu sama lain harus diperhatikan. Kearifan lokal mengacu pada kearifan atau nilai-nilai luhur yang terkandung dalam nilai-nilai budaya lokal seperti tradisi, pepitih kata dan motto hidup, yang menjadi modal dalam menciptakan keharmonisan. Pendekatan kearifan lokal memerlukan perhatian pada berbagai bentuk pengetahuan, kepercayaan, pemahaman dan visi, serta praktik atau etika yang memandu perilaku orang-orang dalam suatu komunitas. Namun, perlu dicatat bahwa

Wacana kearifan lokal juga sejajar dengan wacana perubahan, modernisasi, dan relevansi. Hal ini karena kearifan lokal dikaitkan dengan ekspresi budaya asli dalam konteks geografis dan budaya dan selalu diperlukan untuk merespon perubahan sosial. Oleh karena itu, upaya yang dilakukan sesuai dengan penegasan Mas'ud (2018), perlunya mengembangkan pemahaman multikultural bagi seluruh elemen dan lapisan masyarakat serta meningkatkan dialog dan kerjasama internal dan antaragama dengan pemerintah. mengedepankan kerukunan umat beragama.

Misalnya, mungkin ada berbagai bentuk kearifan pertarikan agama lokal,

Pengalaman lokal Sumatera Barat: Adat Basandi Syarak (ABS) Syarak Basandi Kitabullah (SBK), Syarak Mangato Adat Wear (Ulama memberikan fatwa, pribumi melakukannya), Raso jo Pareso (Cendekiawan harus memiliki rasa (hati yang dipelajari) dan pareso (sadar)). otak) rasakan dan jelajahi. Di sini komponen agama dan budaya digabungkan dalam memecahkan masalah. Sehingga tidak ada lagi masalah antara Islam dan adat di tanah Minang. Kearifan lokal menyeimbangkan ketegangan dalam agama.

5. SIMPULAN

Kehidupan multikultural memerlukan pemahaman dan kesadaran multikultural, yang menghargai perbedaan, pluralitas dan sekaligus keinginan untuk berkomunikasi secara jujur dengan siapapun. Menghadapi keragaman, diperlukan sikap moderat, bentuk moderasi ini bisa berbeda-beda dari satu tempat ke tempat lain. Sikap moderat adalah mengakui adanya pihak lain, toleran, menghargai perbedaan pendapat dan tidak memaksakan kehendak dengan kekerasan. Peran pemerintah, tokoh masyarakat dan ustadz diperlukan untuk mengembangkan pemahaman sosial dan moderasi beragama dalam masyarakat Indonesia untuk mencapai kerukunan dan perdamaian. Bagi masyarakat Indonesia, visi multikultural merupakan prasyarat penting untuk menciptakan kerukunan bangsa, oleh karena itu pendidikan, pelatihan dan pembinaan masyarakat harus dilaksanakan. Moderasi beragama harus digalakkan melalui seminar, pernyataan dan dialog kebangsaan sehingga menjadi sikap bangsa Indonesia. Pemerintah dapat menjadi motor penggerak gerakan moderasi beragama ini melalui Kementerian Agama, Pusdiknas dan Penyuluh Keagamaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Pengembangan Kompetensi Penyuluh Agama pada Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama. Tangerang: Young Progressive Muslim.
- Darlis. (2017). Mengusung Moderasi Islam di Tengah Masyarakat Multikultural. *Rausyan Fikr*, Vol.13 No. 2 Desember, 225-255.
- Fahrudin. (2019). Pentingnya Moderasi Beragama bagi Penyuluh Agama. *Republika*.
- Kementrian Agama RI. (2015). Naskah Akademik Bagi Penyuluh Agama Puslitbang Kehidupan Keagamaan. Jakarta.
- Muhamad Wahib Jamil, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Kulon Progo, (2022), *Moderasi Beragama: Pondasi Komitmen Kebangsaan*.
- Novita Siswayanti, Nurrahmah, Mahmudah Nur, (Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi, Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama), 2021, *Penguatan Moderasi Beragama Melalui Tradisi Ritual Keagamaan*.
- Mas'ud, A. (2018). *Strategi Moderasi Antarumat Beragama*. Jakarta: Kompas.
- Nugraha. (2008). *Wawasan Multikultural*. Bandung: BDK Bandung.
- PUSHAM UII Yogyakarta, (2018), *Buku Panduan Penanganan Konflik Bernuansa Keagamaan, untuk Pemerintah Daerah dan Kepolisian*.
- PUSHAM UII Yogyakarta, (2021), *Naskah Akademik Kerukunan di Kulon Progo*
- Rakhmat, C. (2008). *Paradigma Konseling Berbasis Budaya: Metateori yang membumikan Konseling dalam konteks Budaya. Pidato penguatan Guru Besar pada FIP UPI*. Bandung : UPI.
- Schwartz, S. (2007). *Dua wajah Islam: moderatisme vs fundamentalisme dalam wacana global*. Jakarta: Belantika.
- Shihab, A. (1999). *Islam Inklusif*. Bandung: Mizan.